

Persepsi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Program Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (Studi Kasus Koperasi Rakyat Pantai, Desa Pangkalan Siata, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat)

*Perceptions and Public Participation on Forest Plantation Development Programm
(A Case Study in Pangkalan Siata Village, District Pangkalan Susu, Langkat)*

Yesi Novia O Samosir^a, Agus Purwoko^b, Herianto^c

^a*Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara Jl. Tri Darma Ujung No. 1 Kampus USU Medan 20155 (*Penulis Korespondensi, E mail: yesi_nos@yahoo.com)*

^b*Staff Pengajar Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara*

^c*Kepala Seksi Reboisasi Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara*

Abstrak

Hutan Tanaman Rakyat (HTR) merupakan kebijakan pemerintah Indonesia yang membutuhkan partisipasi dan tanggungjawab dari masyarakat lokal untuk mengelola hutan produksi secara berkelanjutan. diharapkan membuat hutan lestari, produktif serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui penyerapan tenaga kerja secara langsung khususnya di sektor kehutanan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Tingkat persepsi dan partisipasi masyarakat yang menjadi sasaran dari pembangunan htr dapat menjadi pedoman bagi kebijakan pemerintah untuk memberdayakan masyarakat agar lebih berperan aktif dalam memelihara, mengelola dan memanfaatkan potensi hutan secara lestari. Sehingga perlu diketahui tingkat persepsi dan partisipasi masyarakat terhadap program hutan tanaman rakyat. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara *purposive sampling* (sampel bertujuan). Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer didapat dari hasil survei dan observasi langsung di lapangan serta wawancara melalui penyebaran kuisioner. Dilakukan perhitungan persentase persepsi dan partisipasi dengan menggunakan rumus, kemudian tingkat persepsi dan partisipasi masyarakat terhadap hutan tanaman rakyat dikelompokkan dalam tiga kategori yaitu tinggi, sedang dan rendah. Hasil penelitian diketahui tingkat persepsi masyarakat Desa Pangkalan Siata yang berada di kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat sebesar 84,02% (tinggi), tingkat partisipasi masyarakat terhadap beberapa kegiatan antara lain pada kegiatan perencanaan sebesar 55,47% (sedang), kegiatan pelaksanaan sebesar 64,44% (sedang) serta pada kegiatan penilaian atau evaluasi sebesar 51,10% (sedang).

Kata kunci : Persepsi Masyarakat, Partisipasi Masyarakat, Hutan Tanaman Rakyat, Koperasi Rakyat Pantai

Abstract

Community Plantation Forest is Indonesian government policy which needed participation and responsibility from local community to manage production forest sustainability. Which is expected to make a sustainable and productive forest, increase community welfare through the direct absorption of laborers especially in forestry sector and increase regional economic growth Public be target to forest plantation development programme in existing can be basis for government policy to empower human so that they will be more active in preserving, managing and using forest potency sustainability. So, the rate of perceptions and public participation on forest plantation programme have to been known. Sampling technique uses purposive sampling. This riset uses primer and secondary data. Primer data can be gotten from survey and direct observation and interview by spread of. Then, counted the rate of perceptions and public participation on forest plantation programme by using formula, then it will be grouped into three categories namely high, medium and low. The result of riset is the level of public perception in Pangkalan Siata Village located in Pangkalan susu district, Langkat is 84,02% (good), the rate of public participation for some acivities such as planning 55,47% (medium), actuating 64,44% (medium), and evaluation 51,10% (medium)

Keyword : Public Perception, Public Participation, Commmunity Plantation Forest, Coastal Peoples Cooperation.

PENDAHULUAN

Pembangunan hutan tanaman oleh rakyat diharapkan secara bertahap akan mengubah lahan kritis menjadi produktif dan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan melalui pembangunan hutan tanaman rakyat belum mampu mengimbangi laju kerusakan hutan. Beberapa faktor yang menyebabkan

lambannya pembangunan hutan tanaman rakyat adalah kurangnya minat masyarakat. Untuk mendukung minat masyarakat dan pengusaha lokal dalam mengembangkan hutan tanaman rakyat dibutuhkan beberapa hal yaitu sosialisasi program ditingkat masyarakat sehingga tepat sasaran; kepastian hukum atas status lahan; informasi kelayakan usaha baik secara teknis maupun finansialnya dan; pendampingan kelembagaan masyarakat. Implementasi hutan tanaman rakyat dibekali oleh beberapa faktor pendukung dalam hal ini Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 23 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Kehutanan Nomor 5 Tahun 2008 dan yang baru untuk saat ini Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 55 Tahun 2011.

Kebijakan pembangunan HTR ini terkait dengan kebijakan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan (*pro-poor*), menciptakan lapangan kerja baru (*pro-job*) dan memperbaiki kualitas pertumbuhan melalui investasi yang proporsional antar pelaku ekonomi (*pro-growth*) sebagaimana menjadi agenda revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sehingga sektor kehutanan diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional, perbaikan lingkungan hidup, menyejahterakan masyarakat dan memperluas lapangan kerja.

Desa Pangkalan Siata Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat merupakan salah satu daerah yang potensial dalam pembangunan hutan tanaman rakyat dengan luas areal HTR adalah 100 ha yang pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR) kepada Koperasi Rakyat Pantai. Hutan harus dijaga dan dipertahankan secara lestari maka diperlukan kesadaran masyarakat sekitar hutan sehingga penulis melakukan penelitian mengenai tingkat persepsi dan tingkat partisipasi masyarakat terhadap hutan tanaman rakyat. Melalui pemahaman yang lebih baik, diharapkan prioritas pembangunan dan pengelolaan hutan tanaman rakyat dengan melibatkan masyarakat ke depannya lebih sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat lokal agar meningkatnya kepedulian masyarakat dalam melestarikan hutan.

METODOLOGI PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Hutan Tanaman Rakyat Koperasi Rakyat Pantai yang berkedudukan di Desa Pangkalan Siata, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni-Agustus 2014.

Alat dan Bahan Penelitian

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat tulis untuk menulis, kamera digital untuk dokumentasi, *tape recorder* untuk merekam, perangkat komputer untuk mengolah data. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar kuesioner sebagai bahan wawancara.

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara *purposive sampling* (sampel bertujuan). Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Pangkalan Siata yang terdiri dari anggota di Koperasi Rakyat Pantai dan bukan anggota koperasi. Menurut Chadwick, dkk (1991) menyatakan bahwa dalam penarikan sampel purposif, atau timbangan, peneliti menggunakan keahliannya untuk memilih subjek yang mewakili populasi yang dikajinya. Sampel purposif, di mana peneliti memilih subjek dengan anggapan bahwa subjek tersebut mewakili populasi. Banyaknya sampel (responden) yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 45 orang yaitu 15 orang anggota koperasi dan 30 orang yang berada di luar anggota koperasi.

Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer didapat dari hasil survei dan observasi langsung di lapangan serta wawancara melalui penyebaran kuisisioner kepada responden. Untuk melengkapi kuisisioner yang disebarkan kepada masyarakat maka dilakukan wawancara (*deep interview*) kepada beberapa informan kunci. Data primer yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Karakteristik sosial, ekonomi dan budaya masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan kuesioner.
- b. Persepsi masyarakat terkait peraturan dalam pembangunan hutan tanaman rakyat, pola pengembangan hutan tanaman rakyat, jenis tanaman pada hutan tanaman rakyat, kondisi dan keamanan areal hutan tanaman rakyat, hak dan kewajiban masyarakat dalam program pembangunan hutan tanaman rakyat, fungsi dan manfaat hutan tanaman rakyat, keterlibatan masyarakat dalam program pembangunan hutan tanaman rakyat, sikap masyarakat terhadap hutan tanaman rakyat
- c. Partisipasi masyarakat terkait kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pada hutan tanaman rakyat.

Data sekunder adalah data dan informasi yang diperoleh dari hasil pencatatan terhadap data-data yang sudah tersedia.

Analisis Data

a. Persepsi Masyarakat

Data-data yang diperoleh melalui penyebaran kuisioner dan wawancara (*deep interview*) kepada beberapa informan kunci dianalisis secara deskriptif untuk mengetahui persepsi masyarakat Desa Pangkalan Siata, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat. Metode deskriptif digunakan untuk mengetahui dan menganalisis data yang terkumpul dari hasil kuisioner, wawancara mendalam, observasi dan studi pustaka (Nazir, 2005).

b. Partisipasi Masyarakat

Tingkat partisipasi masyarakat dalam penelitian ini dinilai berdasarkan skor melalui keterlibatan masyarakat Desa Pangkalan Siata, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat dalam berbagai program kegiatan, di antaranya partisipasi dalam tahap kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan penilaian (evaluasi) terhadap Hutan Tanaman Rakyat. Mikkelsen (1999) menyatakan bahwa penggunaan ranking dan skoring telah lama dikenal untuk menilai harapan, kepercayaan, sikap, kesukaan dan pendapat orang. Penelitian sosial menggunakan ranking dan skoring untuk mengembangkan strategi guna mengubah perilaku masyarakat.

Data-data yang diperoleh dari hasil penyebaran kuisioner disajikan dalam bentuk tabulasi. Kemudian dilakukan perhitungan persentase partisipasi dengan menggunakan rumus (Daniel, 2002) :

$$P(\%) = \frac{n_i}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

- P = Persentase partisipasi
ni = Jumlah sampel pada kategori- i
i adalah kategori tinggi, sedang, dan rendah
N = Jumlah seluruh sampel

Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian (evaluasi) dikelompokkan dalam tiga kategori yaitu tinggi, sedang dan rendah. Adapun kategori yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- Untuk jawaban yang sesuai dengan harapan (tingkat partisipasi tinggi) berada pada interval skor 66,68-100
- Untuk jawaban yang sesuai dengan harapan (tingkat partisipasi sedang) berada pada interval skor 33,34-66,67
- Untuk jawaban yang sesuai dengan harapan (tingkat partisipasi rendah) berada pada interval skor 0-33,33

(Daniel, 2002).

Berdasarkan perhitungan data yang di atas, kemudian data dianalisis secara deskriptif

untuk mendapatkan gambaran mengenai tingkat partisipasi masyarakat Desa Pangkalan Siata, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian (evaluasi) terhadap Hutan Tanaman Rakyat.

Batasan Penelitian

Masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah masyarakat yang berada di Desa Pangkalan Siata dimana terdiri dari masyarakat yang menjadi anggota koperasi dan bukan anggota koperasi.

Persepsi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peraturan dalam pembangunan hutan tanaman rakyat tentang perlu tidaknya peningkatan potensi hutan dan pelestariannya beserta kelembagaan dalam pengelolaannya; pola pengembangan hutan tanaman rakyat yang dilakukan adalah pola mandiri seperti yang disebutkan berdasarkan Permenhut No. P.55/Menhut-II/2011 Pasal 6 pola pengembangan Hutan Tanaman Rakyat mengikuti 3 pola, yaitu (a) Pola Mandiri yaitu HTR yang dibangun oleh pemegang IUPHHK-HTR, (b) Pola Kemitraan yaitu HTR yang dibangun oleh pemegang IUPHHK-HTR bersama dengan mitra berdasarkan kesepakatan bersama dengan difasilitasi oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah agar terselenggara kemitraan yang menguntungkan kedua belah pihak, dan (c) Pola Developer yaitu HTR yang dibangun oleh BUMN atau BUMS atas permintaan pemegang IUPHHK-HTR dan biaya pembangunannya menjadi tanggung jawab pemegang IUPHHK-HTR; jenis pohon pada hutan tanaman rakyat tentang jenis pohon yang diinginkan untuk ditanam; kondisi dan keamanan hutan tanaman rakyat tentang ada tidaknya pelanggaran di dalam dan di sekitar areal hutan tanaman rakyat; hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan hutan tanaman rakyat tentang ada tidaknya hak dan kewajiban masyarakat dalam mengelola hutan; fungsi dan manfaat hutan tanaman rakyat bagi masyarakat; keterlibatan masyarakat tentang bersedia tidaknya terlibat dalam mengelola hutan tanaman rakyat; sikap masyarakat terhadap hutan tanaman rakyat tentang bagaimana respon masyarakat dalam menanggapi setiap kegiatan pengelolaan.

Partisipasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah partisipasi masyarakat dalam perencanaan kegiatan yaitu hadir dalam pertemuan untuk merencanakan kegiatan hutan tanaman rakyat dan memberi usulan atau ide untuk kelancaran di lapangan; pelaksanaan kegiatan yaitu penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan

pemasaran; partisipasi masyarakat dalam evaluasi berupa pelaporan hasil survei tanaman di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden Desa Pangkalan Siata

Responden yang dipilih dalam penelitian ini berjumlah 45 responden dari lokasi pembangunan Hutan Tanaman Rakyat yang berada di Desa Pangkalan Siata Kecamatan Pangkalan Susu. Karakteristik responden penelitian meliputi tingkat umur, suku, agama, pekerjaan, pendidikan, lama bermukim, tingkat pendapatan dan jumlah tanggungan. Data karakteristik responden penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

Tingkat umur responden

Tingkat umur responden yang diteliti berdasarkan pertimbangan bahwa responden memiliki pengetahuan dan wawasan mengenai lingkungan berdasarkan umur, yakni terkait pengalaman hidup dengan lingkungan dimana responden berinteraksi secara langsung maupun tidak langsung dengan lingkungan sekitarnya. Umur responden dikategorikan dalam lima kelompok yakni umur 20 tahun sebagai umur responden termuda yang dianggap cukup mampu mengetahui lingkungannya dan mampu mengkomunikasikan perspektifnya hingga umur 61 tahun ke atas yang diperkirakan mewakili usia tertua yang dapat diwawancarai. Tingkat umur responden di Desa Pangkalan Siata disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Tingkat Umur Responden di Desa Pangkalan Siata

No	Kelompok Umur	Jumlah	Persentase (%)
1	20 – 30	4	8.88
2	31 – 40	12	26.66
3	41 – 50	18	40
4	51 – 60	8	17.77
5	> 61	3	6.66
Jumlah		45	100

Berdasarkan kelompok umur pada Tabel 1 menunjukkan bahwa persentase dari Desa Pangkalan Siata terbesar didominasi oleh kelompok umur 41–50 tahun yaitu sebesar 40%. Berdasarkan informasi tersebut terlihat merupakan masyarakat yang memanfaatkan sumberdaya hutan terbesar dilakukan oleh kelompok umur produktif. Hal ini berhubungan dengan aktivitas keseharian masyarakat sebagai nelayan dan mudah ditemukan. Menurut Birgantoro, dkk (2007) bahwa usia mempengaruhi tingkat pemanfaatan sumberdaya hutan. Semakin tua usia seseorang maka

semakin kurang produktif, sehingga pemanfaatan sumberdaya hutan yang ada juga relatif kecil. Masyarakat ini mampu berinteraksi secara langsung dan biasanya lebih memahami ekosistem yang berada di hutan mangrove. Responden yang termasuk kelompok umur produktif merupakan responden yang sudah berumah tangga dan bekerja di lingkungan sekitar desa sehingga mendorong masyarakat untuk memanfaatkan sumberdaya hutan yang ada untuk meningkatkan pendapatan keluarga.

Suku dan agama responden

Berdasarkan hasil kuesioner dari responden diketahui bahwa mayoritas suku yang ada pada masyarakat di Desa Pangkalan Siata adalah suku Aceh (71,11%). Karakteristik suku responden di Desa Pangkalan Siata disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Karakteristik Suku Responden di Desa Pangkalan Siata

No	Suku	Jumlah	Persentase (%)
1	Aceh	32	71.11
2	Melayu	2	4.44
3	Jawa	10	22.22
4	Karo	1	2.22
Jumlah		45	100

Sedangkan dalam hal agama dari responden di Desa Pangkalan Siata diketahui beragama Islam (100%). Masyarakat di Desa Pangkalan Siata sangat peduli dan saling tolong-menolong sehingga suasana tetap kondusif dan stabil.

Pekerjaan responden

Masyarakat Desa Pangkalan Siata yang merupakan masyarakat pesisir yang latar belakang perekonomiannya dari produksi perikanan dan hasil hutan di daerah tersebut. Secara umum sistem perekonomian masyarakat Desa Pangkalan Siata ditopang oleh hasil-hasil laut. Pekerjaan responden di Desa Pangkalan Siata disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Pekerjaan Responden di Desa Pangkalan Siata

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase (%)
1	Nelayan	25	55.55
2	Petani	11	24.44
3	Pedagang	2	4.44
4	Peternak	1	2.22
5	Wiraswasta	2	4.44
6	Buruh petani	4	8.88
Jumlah		45	100

Berdasarkan pekerjaan responden di Desa Pangkalan Siata pada Tabel 3 menunjukkan bahwa pekerjaan yang paling banyak digeluti oleh responden adalah nelayan sebanyak 55,55%. Kelompok masyarakat yang

bermata pencaharian sebagai nelayan merupakan masyarakat yang mayoritas bertempat tinggal di sepanjang pesisir yang pekerjaannya mencari ikan. Selanjutnya jenis pekerjaan sebagai petani sebanyak 24,44% mempunyai ketergantungan tinggi terhadap hutan. Hal ini disebabkan karena pada umumnya masyarakat desa Pangkalan Siata memiliki lahan untuk dikelola dan keberadaan tempat tinggal di sekitar hutan.

Tingkat pendidikan responden

Tingkat pendidikan yang diteliti bahwa responden yang memiliki ilmu pengetahuan, wawasan luas dan keterampilan sangat berpengaruh terhadap pemanfaatan sumberdaya hutan. Apabila terdapat pendidikan yang rendah, wawasan yang sempit dan keterbatasan keterampilan dapat menyebabkan pemanfaatan sumberdaya hutan yang ada tidak terkendali dengan baik dan akan berdampak negatif terhadap kelestarian sumberdaya hutan yang ada. Pernyataan Coleman (1988); Fukuyama (2007) yang menyatakan modal manusia sangat penting, karena modal usaha tidak hanya berwujud fisik saja, melainkan akan didominasi oleh modal manusia seperti pendidikan, keterampilan dan kecerdasan hubungan. Tingkat pendidikan responden di Desa Pangkalan Siata disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Tingkat Pendidikan Responden di Desa Pangkalan Siata

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	SD	37	82.22
2	SLTA	8	17.77
Jumlah		45	100

Berdasarkan hasil tingkat pendidikan terbanyak responden di Desa Pangkalan Siata pada umumnya masih tergolong rendah. Hal ini terlihat dari sebagian besar masyarakat yang hanya menempuh tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) sebanyak 82,22%. Masyarakat tidak melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi dikarenakan kurang mampu dalam biaya pendidikan, jarak antara tempat tinggal dengan sekolah sangat jauh dan sebagian masyarakat kurang antusias untuk bersekolah sehingga lebih tertarik bekerja di lahan sendiri. Kondisi ini tentunya mengakibatkan ketergantungan masyarakat terhadap sumberdaya hutan menjadi sangat besar.

Tingkat pendapatan responden

Tingkat pendapatan masyarakat sangat berkaitan dengan profesi atau jenis pekerjaan yang dimiliki oleh responden. Tingkat pendapatan yang diteliti bahwa responden

secara langsung dan tidak langsung berpengaruh terhadap faktor musim dan faktor kondisi cuaca (angin). Apabila sedang musim pasang mati dan angin terlalu kencang, maka nelayan tidak bisa ketengah laut untuk mencari ikan. Pernyataan Hardjanto (2002) yang menyatakan keahlian, kemampuan, pengetahuan dan sikap merupakan bagian dari mutu modal manusia yang sangat berperan dalam pembangunan ekonomi. Tingkat pendapatan responden di Desa Pangkalan Siata pada Tabel 5.

Tabel 5. Tingkat Pendapatan Responden di Desa Pangkalan Siata

NO	Tingkat Pendapatan (Rp)	Jlh	Persentase (%)
1	<500.000	3	6.66
2	>500.000 – 1.000.000	14	31.11
3	>1.000.000 – 1.500.000	19	42.22
4	>1.500.000 – 2.000.000	7	15.55
5	>2.000.000	2	4.44
Jumlah		45	100

Tabel 5 tingkat pendapatan masyarakat secara umum pada lokasi penelitian adalah tergolong rendah bahkan tidak menentu tiap bulannya yaitu > 500.000-1.000.000 sebesar 31,11% dan pendapatan > 1.000.000-1.500.000 sebesar 42,22% dengan kata lain bahwa terdapat 73,33% responden yang memiliki pendapatan di bawah atau sama dengan Rp. 1.500.000. Kondisi jumlah pendapatan tersebut dikategorikan rendah berdasarkan Badan Pusat Statistik tahun 2005 yang menyebutkan dalam indikator kesejahteraan apabila pendapatan masyarakat < Rp. 5.000.000 digolongkan pada kriteria rendah.

Lama menetap responden

Berdasarkan hasil wawancara kepada responden bahwa masyarakat yang lama bermukim di sekitar hutan lebih banyak pengalaman daripada masyarakat yang baru bermukim di sekitar hutan tentang pelestarian sumberdaya hutan dan pemanfaatannya. Lama bermukim responden di Desa Pangkalan Siata disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Lama Bermukim Responden di Desa Pangkalan Siata

No	Lama Bermukim	Jumlah	Persentase (%)
1	≤ 5	1	2.22
2	6 – 10	1	2.22
3	11 – 15	3	6.66
4	16 – 20	5	11.11
5	> 20	35	77.77
Jumlah		45	100

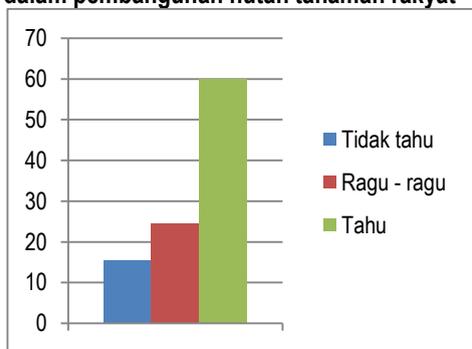
Komponen responden di Desa Pangkalan Siata berdasarkan lama bermukim lebih banyak pada rentang > 20 tahun sebanyak

35 orang yaitu 77,77%. Masyarakat mengatakan bahwa lamanya bermukim di Desa Pangkalan Siata telah lama sejak kecil dan belum pernah berpindah.

Persepsi Masyarakat Terhadap Hutan Tanaman Rakyat

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa persepsi masyarakat Desa Pangkalan Siata yang berada di Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat terhadap hutan tanaman rakyat sangat setuju adanya program pembangunan hutan tanaman rakyat. Pada umumnya masyarakat yang bekerja sebagai nelayan dan petani dapat menambah pekerjaan baru dan meningkatkan perekonomian sehingga mereka bergabung dalam koperasi untuk berpartisipasi dalam pengelolaan hutan tanaman rakyat. Disamping itu, kesadaran masyarakat yang cukup tinggi terhadap hutan bahwa kehidupannya bergantung dari hutan maka sumberdaya hutan perlu dijaga dan ditingkatkan potensi hutan serta mengelolanya secara lestari. Hal ini sesuai dengan pernyataan Sormin (2006) mendefinisikan bahwa persepsi merupakan sebagai proses dimana seseorang menjadi sadar segala sesuatu dalam lingkungannya melalui indera yang dimiliki, pengetahuan lingkungan diperoleh melalui interpretasi data indera. Persepsi dalam pengertian psikologi adalah proses perencanaan informasi untuk dipahami. Alat untuk memperoleh informasi tersebut adalah penginderaan (penglihatan, pendengaran, peraba, dan sebagainya). Sebaliknya alat untuk memahaminya adalah kesadaran atau kognisi.

Persepsi masyarakat terhadap peraturan dalam pembangunan hutan tanaman rakyat



Gambar 1. Persentase Jawaban Responden terhadap Pertanyaan tentang Peraturan Dalam Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat Mengenai pertanyaan tentang peraturan dalam pembangunan hutan tanaman rakyat, diketahui 60% responden yang tahu tentang peraturan dalam pembangunan hutan tanaman rakyat. Hampir semua anggota koperasi yang menjadi responden tahu tentang peraturan

dalam pembangunan hutan tanaman rakyat. Dan di luar dari anggota koperasi ada sebagian mengetahui tentang peraturan dalam pembangunan hutan tanaman rakyat dikarenakan mereka adalah tenaga kerja dalam pelaksanaan kegiatan hutan tanaman rakyat dengan persetujuan dari pengurus koperasi dan anggota koperasi.

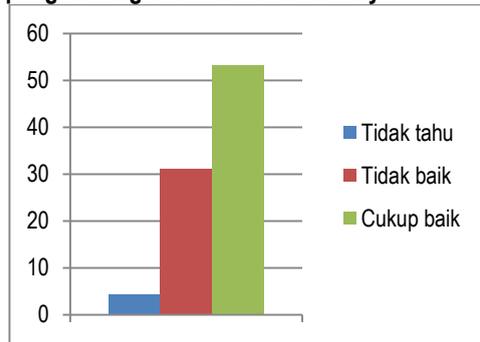
Responden menjawab bahwa peraturan dalam pembangunan hutan tanaman rakyat antara lain hutan tanaman rakyat memiliki kawasan di hutan produksi yang dikelola oleh koperasi atas izin dari pemerintah; adanya dasar hukum dalam pembangunan hutan tanaman rakyat; yang dapat memperoleh IUPHHK-HTR adalah perorangan dan koperasi dalam skala mikro, kecil, menengah dan dibangun oleh masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan, jangka waktu Izin IUPHHK-HTR paling lama 60 tahun; setiap 2 tahun diadakan evaluasi oleh Balai Pemantauan dan Pengelolaan Hutan Produksi (BPPHP); tahun ke 7 sudah bisa produksi, kelembagaan dalam program pembangunan hutan tanaman rakyat yaitu dinas kehutanan langkat, koperasi rakyat pantai, BPPHP.

Namun, 15,55% responden yang tidak tahu mengenai peraturan dalam pembangunan hutan tanaman rakyat walaupun sebagian masyarakat bermatapencaharian dari hasil hutan. Hal ini dikarenakan tingkat pendidikan responden yang rendah akan wawasan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat terhadap hutan di sekitar lingkungannya dimana sebanyak 82,22% masyarakat yang hanya menempuh tingkat pendidikan lulusan Sekolah Dasar (SD).

Terdapat 24,44% responden yang ragu-ragu terhadap peraturan dalam pembangunan hutan tanaman rakyat. Penyebabnya ada pada pengetahuan dan wawasan masyarakat tentang hutan tergolong rendah dan masyarakat kekurangan informasi seperti penyuluhan terhadap hutan tanaman rakyat, dan sebagian masyarakat ada juga yang kurang memahami aturan dalam hutan tanaman rakyat yang diadakan pemerintah. Penyuluhan sebagai proses pembelajaran (pendidikan nonformal) yang ditujukan untuk petani dan keluarganya memiliki peran penting di dalam pencapaian tujuan pembangunan bidang pertanian dan kehutanan. Penyuluh sebagai komunikator pembangunan diharapkan dapat bermain multiperan, sebagai guru, pembimbing, penasehat, penyampai informasi dan mitrapetani (Vitayala, 2007). Dengan berada di tengah masyarakat maka penyuluh kehutanan dapat mengetahui secara dekat aktivitas masyarakat

sehari-hari dalam interaksinya dengan hutan, di samping itu akan menambah keakraban dan kepercayaan antara penyuluh kehutanan dengan masyarakat setempat.

Persepsi masyarakat terhadap pola pengembangan hutan tanaman rakyat



Gambar 2. Persentase Jawaban Responden terhadap Pertanyaan tentang Pola Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat

Pola pengembangan hutan tanaman rakyat yang dilakukan di Desa Pangkalan Siata adalah pola mandiri. Pola mandiri menjadi pilihan yang baik karena pola mandiri memungkinkan masyarakat untuk merencanakan pola tanam/sistem produksi sesuai pengalaman mereka masing-masing tanpa ada intervensi dari mitra. Selain itu prosedur pembangunan HTR pola mandiri lebih sederhana dibandingkan dengan pola kemitraan dan pola developer, sehingga biaya administrasi pembangunan HTR dengan pola mandiri dapat lebih murah.

Mengenai pertanyaan tentang pola pengembangan hutan tanaman rakyat, sebanyak 53,33% responden memiliki persepsi bahwa pola pengembangan hutan tanaman rakyat cukup baik antara lain pola mandiri yang artinya hutan tanaman rakyat dibangun oleh pemegang IUPHHK-HTR dengan biaya sendiri. Dimana berdasarkan Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor : 522.11-37/K/2012, tanggal 12 Nopember 2012, tentang pemberian IUPHHK-HTR seluas ± 360 Ha kepada Koperasi Rakyat Pantai. Areal hutan tanaman rakyat terbagi menjadi 2 (dua) lokasi. Lokasi I yang dijadikan sebagai lokasi penelitian berada di Desa Pangkalan Siata, Kecamatan Pangkalan Susu seluas ± 100 ha dengan memiliki kelompok hutan Sei Bemban. Lokasi II di Desa Halaban Kecamatan Besitang dengan memiliki kelompok hutan Sei Tungkam.

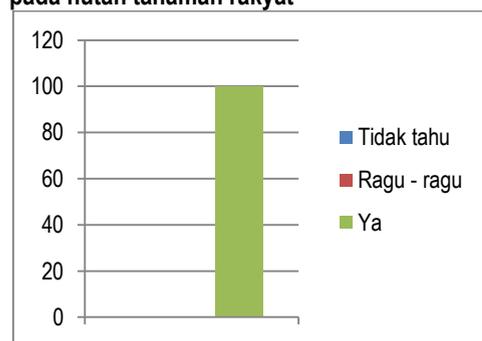
Untuk pembiayaan, di desa ini melakukan beberapa simpanan bagi anggota koperasi. Simpanan pokok Rp 50.000,00 untuk menjadi anggota, simpanan wajib Rp 10.000,00 dipotong dari penjualan arang ke koperasi, simpanan sukarela dilakukan bebas. Responden

yang menjadi anggota koperasi dan diluar anggota juga merasakan pola pengembangan hutan tanaman rakyat di desa ini cukup baik. Responden juga menyebutkan bahwa program pembangunan hutan tanaman rakyat di Desa Pangkalan Siata sedang berjuang dan sejauh ini aman sedangkan untuk masalah keuangan/pembiayaan tidak terlalu rumit karena melihat dari penghasilan yang didapatkan sangat membantu dalam perekonomian mereka yang menjadi anggota dan di luar anggota sebagai tenaga kerja tambahan saja.

Namun, sebanyak 31,11% responden memiliki persepsi bahwa pola pengembangan hutan tanaman rakyat tidak baik. Hal ini disebabkan responden yang diluar anggota merasa kekurangan dana karena biaya pribadi merasa keberatan dengan sistem pembiayaan dan sebagian responden tidak bergabung dengan koperasi yang ada disebabkan mereka terlalu sering tidak mendapatkan hasil yang baik dari program kerja koperasi sebelumnya yang mereka ikuti sehingga merugikan tenaga dan biaya bagi mereka.

Terdapat 15,55% responden memiliki persepsi tidak tahu terhadap pola pengembangan hutan tanaman rakyat antara lain adanya responden yang bukan menjadi anggota tidak tahu sama sekali tentang pola pengembangan hutan tanaman rakyat. Hal ini disebabkan kurangnya perhatian dan keingintahuan berupa wawasan mereka terhadap implementasi dari kebijakan prioritas Departemen Kehutanan terutama revitalisasi sektor kehutanan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat, sesuai pernyataan Wibowo (1998) yang menyatakan bahwa persepsi juga dipengaruhi oleh faktor – faktor sosial budaya dan sosial ekonomi seperti pendidikan, lingkungan tempat tinggal, suku bangsa dan lainnya.

Persepsi masyarakat terhadap jenis pohon pada hutan tanaman rakyat



Gambar 3. Persentase Jawaban Responden terhadap Pertanyaan tentang Jenis Pohon pada Hutan Tanaman Rakyat

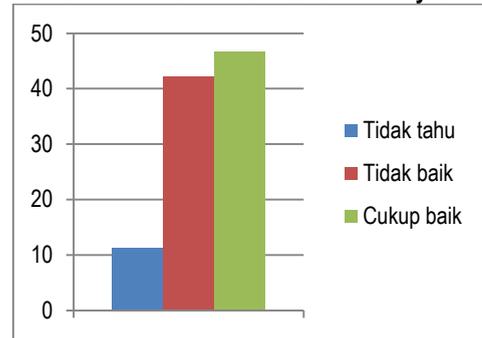
Mengenai pertanyaan tentang jenis pohon pada hutan tanaman rakyat, diketahui 100% responden yang tahu tentang jenis pohon pada hutan tanaman rakyat. Hal ini dikarenakan lamanya bermukim masyarakat di sekitar hutan dan kondisi penutupan lahan Desa Pangkalan Siata yang terdiri dari hutan mangrove dan areal pertanian kering sehingga mereka mengetahui jenis pohon mangrove. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat desa bahwa jenis tanaman bakau (*Rhizophora apiculata*) yang ditanam dalam program pembangunan hutan tanaman rakyat. Disebabkan karena kondisi tanah dan iklimnya yang cocok dan memiliki banyak manfaat dan juga memiliki nilai jual yang cukup tinggi. Sebagian masyarakat Desa Pangkalan Siata berminat mencari penghasilan dari hasil hutan mangrove yang tinggal di sekitar pesisir maupun daratan. Adanya tanggapan yang antusias akan hutan dari masyarakat sehingga hutan perlu untuk dijaga, dilestarikan potensi hutan dan masyarakat juga memanfaatkan hasil hutan untuk kebutuhan hidup.

Jumlah benih yang perlu dibuat tergantung dari jumlah areal yang akan ditanam dan jarak tanaman yang direncanakan ditambah 10% untuk keperluan penyulaman. Sumber benih untuk bibit diperoleh melalui pengambilan buah pohon induk baik dengan memanjat atau pengumpulan buah yang jatuh, dimana buah yang sudah terseleksi dengan baik bisa langsung ditanam (prioritas) di lapangan. Jarak tanam yang dipilih untuk penanaman bakau (*Rhizophora apiculata*) adalah 2m x 2m, dengan desain penanaman sistem bujur sangkar. Penanaman bakau dengan menggunakan propagul yang dilakukan pada saat air laut surut dengan genangan air maksimal sekitar 10 cm.

Penanaman langsung dengan menggunakan propagul umumnya dilakukan apabila areal penanaman berupa tanah lumpur. Penanaman propagul ini dilakukan dengan cara membenamkan seperempat sampai sepertiga panjang propagul ke dalam lumpur secara tegak dengan bakal kecambah menghadap ke atas. Jika propagul ditanam terlalu dalam akibatnya menyebabkan kematian. Untuk *Rhizophora apiculata*, kelopak buah harus selalu dilepas sebelum penanaman. Apabila area penanaman terdiri atas tanah lumpur yang kurang lembek, penanaman propagul dilakukan pada lubang tanam yang dibuat dengan tugal. Sistem penanaman mangrove yang dilakukan yakni sistem banjar harian (penanaman seluruh areal) dan sistem tumpang sari (*silvofishery*). Khusus pada sistem tumpang sari, terdapat tambahan kegiatan dalam tahapan persiapan lapangan

yakni pembuatan konstruksi tambak, saluran air dan tapak tanam.

Persepsi masyarakat terhadap kondisi dan keamanan kawasan hutan tanaman rakyat

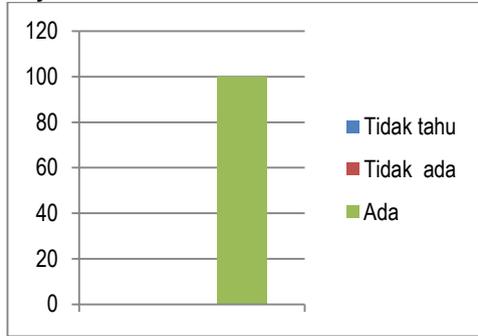


Gambar 4. Persentase Jawaban Responden terhadap Pertanyaan tentang Kondisi dan Keamanan Kawasan Hutan Tanaman Rakyat

Mengenai pertanyaan tentang kondisi dan keamanan areal hutan tanaman rakyat, sebanyak 46,66% responden memiliki persepsi bahwa kondisi dan keamanan areal hutan tanaman rakyat cukup baik. Hal ini dibuktikan adanya perhatian maupun kesadaran masyarakat terhadap hutan tanaman rakyat yang tinggalnya di sekitar pesisir, dengan mengawasi masyarakat untuk tidak sembarangan menebang dan ikut melestarikan sumberdaya hutan yang ada. Namun, terdapat 42,22% responden yang memiliki persepsi bahwa kondisi dan keamanan areal hutan tanaman rakyat tidak baik. Hal ini dikarenakan adanya kegiatan manusia yang dapat merusak tanaman seperti manjailkan ikan, menyudu udang, mencari kepiting, mendaratkan perahu, pencurian kayu dengan bersembunyi yang terjadi pada likasi yang memiliki tegakan umur produktif sehingga pada areal ini perlu dilakukan pengawasan lebih ketat agar keberlangsungan UPHHK-HTR terjamin kelestariannya. Kepiting merusak dengan cara menggigit jaringan bagian dalam propagul atau anakan dengan cara menerusnya. Gangguan dari gerombolan kera yang berburu kepiting/hewan lunak pada saat air surut terkadang merusak propagul. Hama serangga (ulat) merusak daun menyerang propagul. Ombak yang kuat juga dapat mencabut tanaman yang sudah ditanam.

Terdapat 11,11% responden tidak tahu tentang kondisi dan keamanan hutan tanaman rakyat. Hal ini disebabkan masyarakat yang sudah berusia > 60 tahun kurang mampu meninjau langsung ke lapangan sehingga mereka kekurangan informasi. Sebagian masyarakat yang memang kurang peduli terhadap kondisi dan keamanan hutan hanya ingin menikmati hasil hutan saja.

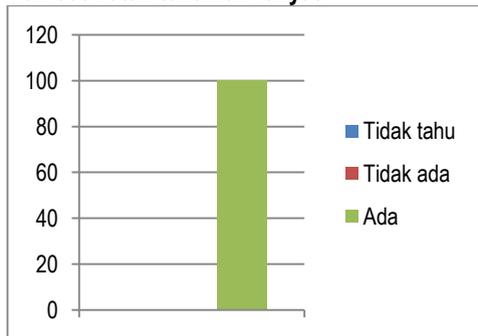
Persepsi masyarakat terhadap hak dan kewajiban dalam program hutan tanaman rakyat



Gambar 5. Persentase Jawaban Responden terhadap Pertanyaan tentang Hak dan Kewajiban dalam Program Hutan Tanaman Rakyat

Mengenai pertanyaan tentang ada tidaknya hak dan kewajiban masyarakat terhadap hutan tanaman rakyat, sebanyak 100% responden memiliki persepsi bahwa masyarakat memiliki hak dan kewajiban masyarakat terhadap hutan tanaman rakyat antara lain haknya adalah memanfaatkan hasil hutan seperti yang telah dilakukan pembuatan arang bakau yang menghasilkan nilai jual tinggi bagi mereka dan kewajibannya adalah menjaga dan melestarikan hutan yang ada. Sebagian masyarakat yang di luar anggota koperasi menyebutkan walaupun mereka tidak memiliki wewenang dalam mengelola areal hutan tanaman rakyat yang sudah ada pihak tertentu bertugas mengelolanya karena memiliki rasa sosialis yang baik antar masyarakat, mereka memahami dan mengetahui hak dan kewajiban setiap anggota koperasi terhadap pengelolaan hutan tanaman rakyat. Sesuai pernyataan Wibowo (1998) yang mengatakan bahwa persepsi juga dipengaruhi oleh faktor – faktor sosial budaya dan sosial ekonomi seperti pendidikan, lingkungan tempat tinggal, suku bangsa dan lainnya.

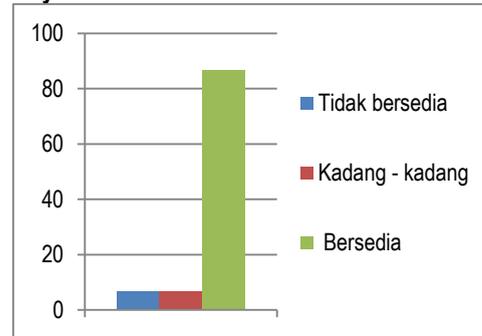
Persepsi masyarakat terhadap fungsi dan manfaat hutan tanaman rakyat



Gambar 6. Persentase Jawaban Responden terhadap Pertanyaan tentang Fungsi dan Manfaat Hutan Tanaman Rakyat

Tingkat persepsi responden mengenai fungsi dan manfaat hutan tanaman rakyat dapat dikatakan tergolong baik dikarenakan bahwa semua responden mengetahui bahwa hutan tersebut sangat bermanfaat dan memiliki fungsi baik secara langsung dan tidak langsung. Sebanyak 100% responden memiliki persepsi kuat dan cukup jelas mengenai fungsi dan manfaat hutan tanaman rakyat yakni hutan merupakan paru-paru dunia, pengaturan tata air, mengurangi polusi atau pencemaran, menyerap polusi yang terjadi dalam pembangunan PLTU di desa sebelah, mencegah erosi, bagi nelayan untuk mencari udang, meningkatkan biota laut, meningkatkan potensi sumberdaya hutan secara lestari dan meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar hutan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Umar (2009) yang menyatakan fungsi hutan antara lain mengatur tata air, mencegah dan membatasi banjir, erosi, serta memelihara kesuburan tanah, menyediakan hasil hutan untuk keperluan masyarakat, melindungi suasana iklim dan memberi daya pengaruh yang baik, dan memberikan keindahan alam.

Persepsi masyarakat terhadap keterlibatan masyarakat dalam program hutan tanaman rakyat



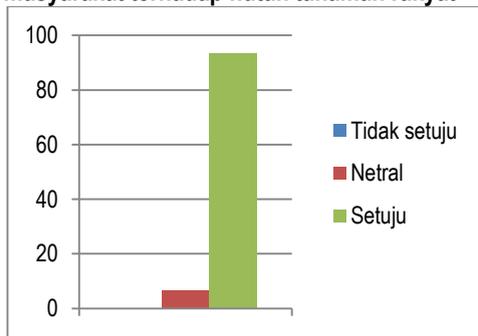
Gambar 7. Persentase Jawaban Responden terhadap Pertanyaan tentang Keterlibatan masyarakat dalam program Hutan Tanaman Rakyat

Keterlibatan masyarakat desa dalam program pembangunan hutan tanaman rakyat yaitu sebanyak 86,66%. Responden bersedia terlibat atau dilibatkan dalam mengelola program pembangunan hutan tanaman rakyat karena masyarakat tersebut memiliki persepsi bahwa hutan merupakan sumber kehidupan, memiliki kesadaran terhadap hutan yang harus dilestarikan dan dijaga. Masyarakat yang menjadi anggota sudah jelas harus terlibat dalam program pembangunan hutan tanaman rakyat di desa ini karena sudah bergabung dalam koperasi sebagai pemegang IUPHHK-HTR sedangkan masyarakat di luar anggota dapat melibatkan diri pada saat diperlukan tenaga kerja dari luar untuk

kegiatan pengelolaan hutan tanaman rakyat dengan persetujuan dari pengurus atau anggota koperasi.

Terdapat 6,66% responden yang kadang-kadang bersedia dan 6,66% responden yang tidak bersedia dilibatkan dalam program pembangunan hutan tanaman rakyat. Penyebabnya karena faktor tingkat usia > 60 tahun keatas yang tidak memungkinkan untuk ikut serta dalam program pembangunan hutan tanaman rakyat. Adanya aktivitas lainnya yang menyebabkan kurangnya waktu dan tenaga, kurangnya kesadaran akan lingkungan untuk ikut serta dalam program pembangunan hutan tanaman rakyat.

Persepsi masyarakat terhadap sikap masyarakat terhadap hutan tanaman rakyat



Gambar 8. Persentase Jawaban Responden terhadap Pertanyaan tentang Sikap Masyarakat terhadap Hutan Tanaman Rakyat

Mengenai pertanyaan tentang sikap masyarakat terhadap hutan tanaman rakyat, diketahui 93,3% responden yang setuju tentang sikap masyarakat terhadap hutan tanaman rakyat. Hal ini dikarenakan adanya lapangan kerja dan usaha bagi masyarakat di sekitar hutan produksi dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan, dapat meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi tidak produktif secara optimal, keamanan yang terbangun dari kesadaran masyarakat di sekitarnya akan rasa memiliki tanggung jawab, mengelola serta memanfaatkan hasil hutan untuk memenuhi dan meningkatkan kebutuhan hidupnya, membangun kebersamaan dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan secara optimal untuk menuju kelestarian dalam mendukung aspek ekonomi, sosial dan ekologi.

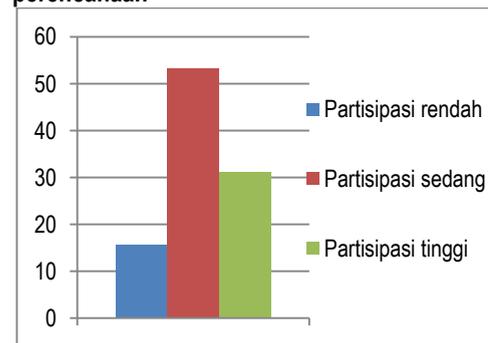
Terdapat 6,66% responden yang bersikap netral terhadap hutan tanaman rakyat dikarenakan mereka bukanlah anggota dari koperasi dan lebih dilandasi keraguan terhadap prospek keberhasilan program. Responden yang bukan anggota koperasi memiliki pengalaman sebelumnya yang memperlihatkan bahwa sebaik apapun konsep program yang ditawarkan

pemerintah, namun hasil yang dirasakan masyarakat tidak optimal. Pendapat ini memang cukup beralasan karena berbagai hasil penelitian (Peluso, 1992; Lyndayati, 2002, Suryamiharja, 2006) menyatakan bahwa kebijakan perhutanan sosial yang dijalankan pemerintah selama ini belum mencapai hasil seperti yang diharapkan. Responden yang ingin bergabung dalam koperasi ini dikarenakan memiliki rasa antusias dan rasa tanggung jawab terhadap hutan dan ingin mendapatkan lapangan kerja untuk tambahan pendapatan. Kebijakan HTR ini sekaligus juga merupakan implementasi dari Kebijakan Prioritas Departemen Kehutanan 2004-2009 terutama revitalisasi sektor kehutanan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat, sehingga sektor kehutanan diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional, perbaikan lingkungan hidup, menyejahterakan masyarakat dan memperluas lapangan kerja.

Tingkat Partisipasi Masyarakat terhadap Program Hutan Tanaman Rakyat

Lokasi hutan tanaman rakyat yang berada di Desa Pangkalan Siata memiliki luas ± 100 ha. Sehingga berpotensi meningkatkan intensitas terjadinya pelanggaran di dalam areal yang dapat mengganggu bahkan merusak kondisi, keamanan dan ekosistem hutan tersebut. Namun dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam melestarikan hutan dapat menjadi solusi yang tepat dalam upaya membantu meminimalkan terjadinya pelanggaran demi menjaga kelestarian hutan. Agar keberlangsungan UPHHK-HTR ini terjamin kelestariannya, masyarakat dapat dijadikan sebagai pelaku utama yang harus dilibatkan secara penuh dengan kesadaran akan hutan yang ada, baik mulai tahap perencanaan, pelaksanaan dan penilaian atau evaluasi.

Partisipasi masyarakat pada kegiatan perencanaan



Gambar 9. Partisipasi Responden dalam Kegiatan Perencanaan Program Hutan Tanaman Rakyat di Desa Pangkalan Siata

Hasil penelitian dapat diketahui bahwa responden yang masuk pada kategori rendah adalah sebesar 15,55%. Kategori rendah yang dimaksud adalah partisipasi sebagian responden yang bukan anggota koperasi terhadap kegiatan perencanaan program pembangunan hutan tanaman rakyat ini tidak ada sama sekali seperti tidak pernah hadir dalam pertemuan, rapat ataupun penyuluhan hutan tanaman rakyat, tidak menyumbangkan ide ataupun mengajukan usul tentang mewujudkan kelestarian terhadap hutan yang ada.

Namun, terdapat 53,33% responden memiliki partisipasi sedang pada perencanaan program pembangunan hutan tanaman rakyat. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan ini tidak maksimal, dapat dinilai dari kehadiran responden yang tidak selalu hadir dalam pertemuan. Responden yang termasuk dalam kategori tinggi sebesar 31,11% dikarenakan antusiasnya masyarakat terhadap kelestarian hutan khususnya mereka yang menjadi anggota koperasi terhadap program pembangunan HTR. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perencanaan untuk mengelola HTR berada pada kategori sedang dikarenakan kurangnya pemberitahuan sosialisasi kepada masyarakat di Desa Pangkalan Siata.

Masyarakat tahu bahwa keberadaan hutan tanaman rakyat sangat penting dan bermanfaat. Pihak dinas kehutanan sudah pernah melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat untuk membahas mengenai hutan tanaman rakyat. Pengurus koperasi yang memegang IUPHHK-HTR juga sudah pernah melakukan sosialisasi untuk merencanakan suatu kegiatan hutan tanaman rakyat. Jika ada program kegiatan yang akan dilakukan sekitar dua atau tiga kali pertemuan dalam sebulan dengan mengundang masyarakat yang menjadi anggota dan bukan anggota koperasi. Masyarakat sangat mengharapkan agar dilakukan kegiatan sosialisasi maupun penyuluhan dengan masyarakat secara intens ke depannya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Suprayitno (2008) bahwa keberadaan penyuluh kehutanan merupakan salah satu ujung tombak pembangunan kehutanan di lapangan. Penyuluh kehutanan mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam mendidik dan mengajak masyarakat sekitar hutan agar mau dan mampu ikut terlibat di dalam pengelolaan hutan secara lestari. Kondisi ideal yang dapat menunjang keberhasilan penyuluhan kehutanan adalah kesadaran, kerelaan dan kesiapan penyuluh tersebut untuk mau dan mampu mendampingi masyarakat dengan berada

ditengah-tengah atau bila perlu menetap bersama masyarakat

Adanya program kegiatan perencanaan hutan tanaman rakyat dapat membantu masyarakat yang bergabung dalam koperasi. Masyarakat dapat mengelola hutan secara lestari, memberikan saran dalam peningkatan program hutan tanaman rakyat agar lebih baik dan kepada masyarakat yang bukan anggota koperasi tetap berpartisipasi mengawasi dan menjaga hutan di sekitarnya. Tentu saja dengan diadakan pertemuan antara masyarakat setempat dapat menciptakan kerjasama yang baik sehingga dapat mempermudah pelaksanaan kegiatan di lapangan.

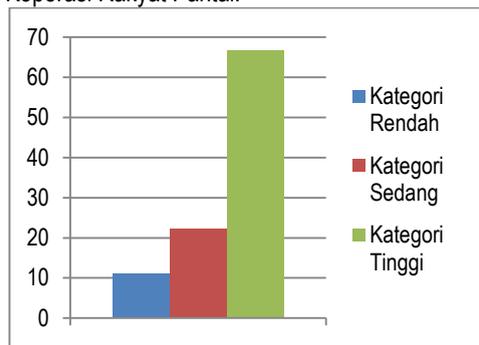
Partisipasi masyarakat pada tahap kegiatan pelaksanaan

Kegiatan pelaksanaan merupakan tahap lanjutan dari tahap perencanaan. Pelaksanaan merupakan realisasi dari suatu perencanaan dan biasanya langsung terjun ke lapangan. Berdasarkan Permenhut No. P.55/Menhut-II/2011 Bab III Pasal 4 yaitu kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (UPHHK) pada HTR melalui kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran.

Penyiapan lahan dilakukan tanpa pembakaran dan pembuatan kanal. Penyiapan lahan dilakukan terhadap kayu-kayu yang memiliki nilai ekonomi rendah dan jenis pohon yang dibudidayakan. Hasil penyiapan lahan akan dibuat menjadi arang oleh anggota koperasi dan dipasarkan oleh koperasi rakyat pantai. Jumlah bibit yang perlu dibuat tergantung dari jumlah areal yang akan ditanam dan jarak tanam yang direncanakan ditambah 10% untuk keperluan penyulaman. Pengadaan benih *Rhizophora apiculata* sebanyak 132.000 batang. Pelaksanaan kegiatan penanaman adalah anggota koperasi rakyat pantai. Jika anggota koperasi dan keluarganya tidak mampu managannya, maka dapat didatangkan tenaga kerja dari luar dengan persetujuan dari pengurus dan anggota koperasi. Kebutuhan tenaga kerja untuk penanaman diperkirakan 6-7 HOK.

Penanaman dilakukan pada bulan April 2014 dengan luas areal 58 ha dan produksi akan dilakukan pada tahun ke tujuh sekitar April 2021. Penanaman dengan jarak tanam 2m x 2m yaitu 1 ha = 2.500 batang. Kegiatan pemeliharaan yang dilakukan adalah penyiangan, penyulaman dan pemangkasan. Penyiangan dilakukan dua kali selama setahun. Penyiangan tidak perlu dilakukan setelah tanaman bakau mencapai tinggi 2 meter karena tanaman mangrove cukup kuat untuk berkompetensi dalam pemanfaatan

ruang dan cahaya matahari. Penyulaman yaitu penanaman semai bakau untuk mengganti tanaman yang mati dan ini dilakukan sampai umur tiga bulan setelah penanaman pertama. Kontrol terhadap faktor-faktor perusak yang dapat menyebabkan kegagalan penanaman bakau di antaranya kepiting, kera, hama daun, dan lainnya. Pemangkasan tanaman biasanya dilakukan terhadap tanaman yang ditanam di tambak, pinggir sungai atau saluran air dan biasanya dilakukan setelah tanaman berumur 3 tahun ke atas. Pemangkasan dilakukan pada diameter rata – rata 8 cm, panjang batang rata-rata 7 cm. Selanjutnya produksi bakau dari areal hutan tanaman rakyat kemudian dijadikan dalam pembuatan arang bakau dan dipasarkan oleh Koperasi Rakyat Pantai.



Gambar 10. Partisipasi Responden dalam Kegiatan Pelaksanaan Program Hutan Tanaman Rakyat di Desa Pangkalan Siata

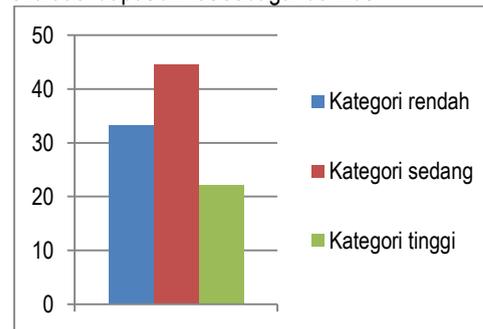
Hasil penelitian diketahui bahwa sebanyak 11,11% responden termasuk dalam kategori rendah. Kategori rendah yang dimaksud adalah responden tidak pernah ikut berpartisipasi dalam kegiatan pelaksanaan program pembangunan hutan tanaman rakyat. Masyarakat mengakui bahwa beberapa faktor yaitu pekerjaan, waktu yang cukup terbatas, umur yang sudah tidak memungkinkan untuk dapat ikut serta dalam kegiatan pelaksanaan di lapangan. Partisipasi masyarakat yang termasuk dalam kategori sedang adalah sebesar 22,22% yaitu responden yang tidak selalu ikut hadir dalam kegiatan pelaksanaan HTR, dan responden yang masuk dalam kategori tinggi adalah sebesar 66,66% responden yang berantusias terhadap hutan tanaman rakyat di desa ini. Mereka yang anggota koperasi dan bukan anggota, aktif ambil bagian dalam kegiatan pelaksanaan dikarenakan sebagian masyarakat mengerti seberapa tingkat kepentingan keberadaan HTR sehingga harus dijaga dan dikelola secara lestari.

Kegiatan pelaksanaan program pembangunan hutan tanaman rakyat dapat meningkatkan pemeliharaan dan pelestarian hutan yang ada. Pihak kelembagaan dari dinas

kehutanan maupun pengurus koperasi melakukan sosialisasi terkait hutan tanaman rakyat di Desa Pangkalan Siata berupa teknik pengelolaan yang baik pada saat kegiatan di lapangan dengan tujuan agar masyarakat lebih memahami pengelolaan dan kelestarian dari sumberdaya hutan. Terkadang masyarakat desa sendiri ada yang melaksanakan teknik pengelolaan yang tidak sesuai dengan aturan yang disepakati dalam kegiatan perencanaan sebelumnya. Hal ini disebabkan masyarakat ingin lebih hemat biaya, waktu dan tenaga dalam pengerjaan di lapangan. Maka diperlukan kesadaran, rasa kepedulian dan perhatian masyarakat lebih dari kelembagaan hutan terhadap hutan agar terjamin kelestarian hutan yang ada di sekitar lingkungan.

Partisipasi masyarakat pada tahap kegiatan evaluasi

Setelah kegiatan dilaksanakan umumnya dilakukan tahap penilaian atau evaluasi. Tahap kegiatan penilaian atau evaluasi ini merupakan tahap akhir dari suatu kegiatan. Pada tahap ini dapat diketahui apakah kegiatan tersebut mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya atau tidak. Kegiatan penilaian atau evaluasi tersebut berbentuk laporan hasil dari kegiatan di lapangan, antara lain pelaporan mengenai keberhasilan tanaman yang tumbuh termasuk hambatan-hambatan yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan. Partisipasi responden dalam kegiatan penilaian atau evaluasi dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 11. Partisipasi Responden dalam Kegiatan Evaluasi Program Hutan Tanaman Rakyat di Desa Pangkalan Siata

Hasil penelitian diketahui bahwa 33,33% responden masuk ke dalam kategori rendah, yaitu masyarakat tidak pernah mengikuti kegiatan penilaian atau evaluasi HTR. Tingkat partisipasi masyarakat yang masuk ke dalam kategori sedang dan tinggi secara berturut-turut adalah sebesar 44,44% dan 22,22%. Hasil penelitian diketahui bahwa partisipasi masyarakat ataupun keterlibatan masyarakat dalam kegiatan penilaian atau evaluasi masih sedang.

Responden masih belum begitu paham tentang pentingnya mengukur keberhasilan tanaman yang telah ditanam, sehingga sedikit acuh tak acuh terhadap kegiatan pemeliharaan tanaman setelah proses pelaksanaan di lapangan. Pengurus koperasi melaporkan evaluasi ke dinas kehutanan setelah dilakukan program kegiatan HTR. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan dari kegiatan HTR yang merupakan kebijakan pemerintah yang sudah diterapkan guna perbaikan di masa mendatang.

Persepsi masyarakat terhadap hutan tanaman rakyat dalam kategori tinggi dimana persepsi pada hakekatnya adalah pandangan atau interpretasi seseorang terhadap suatu obyek. Hal ini sesuai dengan pernyataan Rakhmat (1992) yang menyatakan bahwa persepsi merupakan pengalaman tentang obyek, peristiwa atau hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan penafsiran peran. Setiap orang memiliki pengalaman yang berbeda-beda, maka persepsinya berbeda-beda pula terhadap stimulus yang diterimanya, meskipun dengan objek yang sama. Persepsi masyarakat masuk ke dalam kategori baik yaitu mereka menyadari dirinya bergantung hidup dari sumberdaya hayati hutan tetapi tidak memahami kalau sumberdaya tersebut perlu dikelola secara lestari agar manfaatnya bisa diperoleh secara berkelanjutan, sesuai dengan pernyataan Ngakan, dkk (2006).

Partisipasi masyarakat pada kegiatan pelaksanaan, perencanaan dan penilaian/evaluasi masuk ke dalam kategori sedang yaitu dilihat dari perbandingan jumlah masyarakat yang menjadi anggota koperasi memiliki antusias yang lebih tinggi daripada masyarakat yang bukan anggota koperasi. Sulitnya masyarakat ambil bagian dalam pengelolaan hutan tanaman rakyat ini disebabkan belum bergabungnya dalam Koperasi Rakyat Pantai yang merupakan pemegang IUPHHK-HTR. Sebagian responden belum memiliki rasa kepedulian dan tanggung jawab terhadap hutan yang ada, namun memiliki pemahaman bahwa sudah ada pihak-pihak tertentu yang memiliki wewenang untuk mengelola HTR. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ngakan, dkk (2006) yang menyatakan bahwa berpartisipasi pasif ialah apabila mereka berpikir bahwa harus dilakukan upaya-upaya untuk menjaga keberlanjutan ketersediaan sumberdaya hayati hutan di sekitar kampung mereka, tetapi mereka tidak pernah terlibat aktif dan berharap agar pemerintah atau pihak lain yang melakukannya.

Berdasarkan hasil penelitian persepsi dan partisipasi masyarakat pada setiap kegiatan program pembangunan hutan tanaman rakyat memperlihatkan bahwa masyarakat pada umumnya memiliki pandangan positif. Persepsi masyarakat ini merupakan modal utama untuk mengajak masyarakat agar lebih berperan aktif dan perlu dilibatkan atau terlibat dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan penilaian/evaluasi program pengelolaan hutan tanaman rakyat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Tingkat persepsi masyarakat di Desa Pangkalan Siata, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat terhadap program pembangunan hutan tanaman rakyat berada pada kategori tinggi sebesar 84,02%.
2. Tingkat partisipasi masyarakat di Desa Pangkalan Siata, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat dalam program pembangunan hutan tanaman rakyat terhadap kegiatan perencanaan, kegiatan pelaksanaan, dan kegiatan penilaian/evaluasi berada pada kategori sedang sebesar 51,10%, 55,47% dan 64,44%.

Saran

Saran dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Diharapkan agar kebijakan dan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat tetap berkesinambungan untuk memperoleh terjaminnya UPHHK-HTR secara lestari dengan meningkatkan persepsi dan partisipasi masyarakat.
2. Diperlukan upaya peningkatan kegiatan sosialisasi yang lebih berkesinambungan dan terpadu pada masyarakat sehingga masyarakat lebih memahami tentang maksud dan tujuan dari kebijakan hutan tanaman rakyat.
3. Perlu dilakukan penelitian lanjutan tentang strategi pengembangan hutan tanaman rakyat di Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Awang, S. A. 2001. Gurat Hutan Rakyat di Kapur Selatan. Pustaka Kehutanan Masyarakat. CV. Debut Press. Yogyakarta.
- Awang, S. A. D. Sepsiaji, dan B. Himmah. 2002. Etnoekologi Manusia di Hutan Rakyat. Sinergi Press. Yogyakarta.

- Azwar, S. 1995. Sikap Manusia, Teori dan Pengukurannya. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Ardhana, A. D. C. 2010. Hutan Tanaman Rakyat: Apa dan Bagaimana. Badan Penelitian dan Pengembangan Keutanan Balai Penelitian Kehutanan Banjarbaru. Warta Galam. 4 (1) : 49-60.
- Birgantoro, B., dan N. R. Dodik. 2007. Pemanfaatan Sumberdaya Hutan oleh Masyarakat di KPH Banyuwangi Utara. Jurnal Manajemen Hutan Tropika. 13(3) : 172-181.
- BP2HP Wilayah XVII Jayapura. 2008. Pembangunan HTR di Provinsi Papua. Jayapura. <http://www.bpphp17.web.id/database/data/Pembangunan%20HTR%20di%20Provinsi%20Papua.pdf>. [19 April 2014]
- Chadwick, B., Howard M. B., dan Stan L. A. 1991. Metode Penelitian Ilmu Pengetahuan Sosial. IKIP Semarang.
- Coleman, J. 1988. *Social Capital in Creation of Human Capital*. *American Journal of Sociology* 94 (supplement): pp S95-S120.
- Daniel, M. 2002. Metode Penelitian Sosial Ekonomi. Bumi Aksara. Jakarta.
- Departemen Kehutanan. 2007. Peraturan Pemerintah No. 6/2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.
- Departemen Kehutanan. 2007. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.23/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat Dalam Hutan Tanaman.
- Departemen Kehutanan. 2011. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.55/Menhut-II/2011 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Rakyat pada Hutan Tanaman.
- Departemen Pertanian. 2010. Dasar-dasar penyuluhan pertanian. <http://www.pustaka.deptan.go.id>.
- Emilia dan Suwito. 2007. Hutan Tanaman Rakyat Agenda Baru untuk Pengentasan Kemiskinan. *Working Group On Forest Land Tenure*. www.wg-tenure.org - Warta Tenure. [19 April 2014]
- Fukuyama F. 2007. *Trust: Kebijakan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*. Ruslani, penerjemah. Cetakan kedua. Jakarta: Penerbit Qalam. Terjemahan dari: *Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity*.
- Hardjosoemantri, K. 1985. Hukum Tata Lingkungan. Universitas Gajah Mada Press. Yogyakarta.
- Harjanto. 2002. Mutu Modal Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi. Jurnal Manajemen Hutan Tropika. (6) : 65-71.
- Karsidi, Ravik. 2001. Paradigma Baru Penyuluhan Pembangunan dalam Pemberdayaan Masyarakat. Dalam Pambudy dan A.K.Adhy (ed.): *Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Menuju Terwujudnya Masyarakat Madani*, Bogor: Penerbit Pustaka Wirausaha Muda.
- Kartasapoetra, G. A, dan M. M. Sutedjo. 1987. Teknologi Konservasi Tanah dan Air. PT. Bina Aksara. Jakarta.
- Lyndayati. 2002. *Ideas and Institution in Social Forestry Policy dalam Which Way Forward? People, Forest and Policymaking in Indonesia*. Coffe & Ida Ayu (edt). Yayasan Obor Indonesia.
- Manik, R. 2011. Persepsi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Program Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (Studi Kasus di Desa Securai Selatan, Kecamatan Babalan dan Desa Bintang Maria, Kecamatan Panombeian Pane, Kabupaten Simalungun). Skripsi. Fakultas Pertanian. Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Mikkelsen, B. 1999. Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya Pemberdayaan. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Muhshi, M. A. 2007. Peluang Masyarakat Mengelola dan Memanfaatkan Sumberdaya Hutan Sesuai PP. 6 Tahun 2007, Makalah disampaikan dalam Diskusi Panel Membedah PP.6 Tahun 2007. Diselenggarakan Dinas Kehutanan Propinsi Jambi pada 22 Juni 2007.

- Mu'arif, N. 2002. Memahami Partisipasi Masyarakat untuk Pemeberdayaan. Departemen Kehutanan. Pusat Bina Penyuluhan Kehutanan.
- Nazir, M. 2005. Metode Penelitian. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Ngakan, Putu Oka., H. Komarudin, A. Achmad, Wahyudi, dan A.Tako. 2006. Ketergantungan, Persepsi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Sumberdaya Hayati Hutan Studi Kasus di Dusun Pampli Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. CIFOR. Jakarta.
- Nugraha, A. dan Murtijo. 2005. Antropologi Kehutanan. Wana Aksara. Banten.
- Pemprovsu. 2009. Hutan Tanaman Rakyat. Medan. <http://www.esdm.go.id/pemprovsu-gesa-hutan-tanaman-rakyat.html>. [19 April 2014]
- Peluso, N. L. 1992. *Rich Forest, Poor People; Resource Control and Resistance in Java*. Bereley University of California Press.
- Rakhmat, J. 1992. Psikologi Kemanusiaan. PT. Remaja Rosda Karya. Bandung.
- Sadino. 2011. Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Pembalakan Liar Hutan (*Illegal Logging*). Kementerian Hukum dan HAM. Jakarta.
- Sormin, R. N. S. 2006. Persepsi, Sikap dan Partisipasi Masyarakat terhadap Kawasan Ekowisata Tangkahan. Skripsi. Fakultas Pertanian. Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Suharto, E. 2007. Modal Sosial dalam Kebijakan Publik. Di dalam: Sugeng B dan Susantyo B, editor. Bunga Rampai Modal Sosial dalam Pembangunan Sosial. Bandung: Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial. Hal 1-14.
- Sumardi, S., Sukardi, S.A. Murtolo, dan H. Muryanto. 1997. Peranan Nilai Budaya Daerah dalam Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dirjen Kebudayaan. Yogyakarta.
- Suprayitno, A. R. 2008. Kajian Analitik: Pelibatan Masyarakat Lokal Upaya Memberdayakan Masyarakat Menuju Hutan Lestari. Jurnal Penyuluhan. 4 (2) : 134-138.
- Suryamiharja, S. 2006. Kebijakan dan Kelembagaan *Community Based Forest Management* di Tingkat Nasional dan Pengalaman Mengelola Kerja Multipihak. Pekan Hutan dan Masyarakat Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada *Java Learning Center*. Yogyakarta.
- Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Vitayala, A. S. 2007. Motivasi, Kepuasan Kerja dan Produktivitas Penyuluh Pertanian Lapangan: Kasus Kabupaten Sukabumi. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Wibowo, I. 1998. Psikologi Sosial. Universitas Terbuka. Karunika. Jakarta.
- Yuwono, S. 2006. Persepsi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan Hutan Rakyat Pola Kemitraan di Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan. Sekolah Pascasarjana. Institut Pertanian Bogor. Bogor.